

## Dampak Inovasi Birokrasi dalam Bidang Pariwisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang

Nurul Azizah\*<sup>1</sup> dan Eko Handoyo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

#### Article History

Disubmit 7 Oktober 2019  
Diterima 25 Desember 2019  
Diterbitkan 2 Januari 2020

#### Kata Kunci

inovasi birokrasi;  
pariwisata;  
kesejahteraan masyarakat

### Abstrak

Sektor pariwisata saat ini menjadi primadona yaitu sebagai penyumbang devisa bagi negara dan pemasok pendapatan daerah. Inovasi birokrasi dalam pengembangan sektor pariwisata menjadi harapan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Semarang, oleh sebab itu birokrasi Kota Semarang perlu memperbaiki sistem pelayanan publik dan meningkatkan daya saing untuk mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara. Inovasi yang dilakukan oleh birokrasi Kota Semarang dianalisis menggunakan perspektif teoretis birokrasi dari Max Weber. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak inovasi birokrasi dalam bidang pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak inovasi birokrasi dalam bidang pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber data diperoleh dari informan, dokumentasi, dan peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari inovasi birokrasi dalam bidang pariwisata di Kota Semarang yaitu kesejahteraan masyarakat meliputi terpenuhinya kebutuhan perekonomian bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa pekerjaan atau profesi diantaranya yaitu a) pedagang; b) tukang parkir; c) petugas keamanan; d) petugas kebersihan; e) supir transportasi; f) warga masyarakat.

### Abstract

*The tourism sector is currently the major sector namely as a foreign exchange contributor to the state and regional income suppliers. Bureaucratic innovation in the development of the tourism sector become an opportunity for the welfare of the Semarang Society, therefore the Semarang City bureaucracy needs to improve the public service system and increase the competitiveness to attract the interest of domestic and foreign tourists. The innovations that are carried out by the Semarang City bureaucracy were analyzed by using the bureaucratic theoretical perspective of Max Weber. This study aims to assess the impact of bureaucratic innovation in the development of tourism for the welfare of the society. This study uses a qualitative approach. The focus of this study is the impact of bureaucratic innovation in the development of tourism for the welfare of the society. The data sources were obtained from informants, documentation, and events. The results showed that the impact of bureaucratic innovation in the tourism development in Semarang, namely the welfare of the society that includes the fulfillment of economic needs for the society which can be used for several occupations including a) traders; b) parking attendants; c) security officers; d) janitors; e) transportation drivers; f) society members.*

© 2020 Published by UNNES. This is an open access

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan di berbagai daerah di Indonesia, pariwisata mampu bertahan dalam gejolak perekonomian yang menyebabkan keberadaan pariwisata menjadi prioritas dan primadona. Perkembangan pariwisata di In-

donesia menjawab sebagian tantangan yang harus dicapai. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan penghasil sumber devisa bagi Indonesia. Keberadaan sektor pariwisata juga menyumbangkan pendapatan dalam lingkup daerah maupun negara.

Sektor pariwisata menempati ranking kedua dari 10 ranking sektor penghasil devisa di Indonesia. Sektor pariwisata Indonesia menyumbangkan sebesar 190 triliun setelah hasil ekspor minyak kelapa sawit 239 triliun. Berikut adalah data 10 besar penyumbang devisa terbesar di In-

\* E-mail: [nurulazizah250797@gmail.com](mailto:nurulazizah250797@gmail.com)  
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

donesia berdasarkan data terakhir tahun 2017 (data didapat dari BPS dan Kementerian Perindustrian).

Sajian data di atas menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpengaruh dalam menyumbangkan pendapatan perekonomian di Indonesia dan terus meningkat pada setiap tahunnya. Pemerintah pusat maupun daerah saat ini berlomba-lomba untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya dengan melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah mengakibatkan dalam proses pengelolaan SDA yang tersedia di beberapa wilayah Indonesia tidak dapat *dieksekusi* secara maksimal dengan baik dan benar, tidak sedikit diantaranya yang memanfaatkan alam secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi maupun kelompok akibatnya potensi yang ada menjadi rusak. Keselarasan antara SDA dan SDM perlu ditingkatkan, sebab keduanya memiliki pengaruh dalam keberhasilan pengelolaan sektor pariwisata. Proses pengelolaan SDA yang benar dan upaya peningkatan SDM untuk menjadi lebih maju bukan suatu proses yang mudah, peran serta pemerintah diperlukan. Dalam hal ini yang dapat menjembatani kedua unsur tersebut yaitu inovasi dalam badan pemerintahan.

Schumpeter (1934) dalam Noor (2017: 14) menyatakan bahwa dengan inovasi maka didapat penambahan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi organisasi tapi juga stakeholder dan masyarakat.

Inovasi berarti menciptakan atau mengembangkan ide-ide baru yang diharapkan mampu membawa kemajuan pada kelompok atau organisasi yang sedang dijalankan. Inovasi menjadi *urgent* untuk dilakukan mengingat zaman yang semakin modern dan kebutuhan masyarakat saat ini belum tentu sama dengan masyarakat dahulu.

Inovasi akan berjalan dengan baik apabila terdapat badan pemerintahan yaitu birokrasi yang mampu mendukung dan menjembatani kepentingan yang ada serta mendukung adanya ide-ide yang muncul dari pihak luar salah satunya adalah masyarakat.

Sedangkan birokrasi dapat diartikan sebagai wadah pelayanan bagi masyarakat yang memiliki struktur kepemimpinan yang jelas, berbentuk seperti piramida, dimana lebih banyak orang yang menduduki tingkat bawah daripada tingkat atas.

Tipe ideal birokrasi menurut Weber yaitu mempunyai suatu bentuk pasti dimana semua fungsi dijalankan dengan cara-cara yang rasional. Istilah rasional dengan segala aspek pemahamannya merupakan kunci dari konsep tipe ideal birokrasi Weberian. Sedangkan birokrasi menurut Karl Marx merupakan suatu kelompok partikular yang sangat spesifik. Birokrasi bukanlah khas masyarakat, walaupun eksistensinya berkaitan dengan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu. Lebih tepatnya, menurut Karl Marx birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain birokrasi memihak pada kelas partikular yang mendominasi tersebut (Thoha, 2014: 15-21).

Masyarakat menaruh harapan kepada birokrasi un-

tuk membawa kemajuan bagi daerahnya, disertai dengan adanya tata pemerintahan yang baik dalam biokrasi tersebut. Sehingga akses yang didapat masyarakat cukup mudah baik untuk menyumbangkan ide ataupun ikut andil didalam proses inovasi.

Taschereau dan Campos (1997) dalam Thoha (2014: 63) menjelaskan, bahwa tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu kosep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society*, dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta.

Kendati sektor pariwisata saat ini menjadi aspek unggulan negara Indonesia menyebabkan tuntutan warga negara dalam perbaikan serta pembaruan fungsi internal dan eksternal terhadap birokrasi. Hal tersebut semakin menunjukkan sikap aktif warga negara untuk mewujudkan kemajuan bagi negara Indonesia. Dengan adanya tuntutan tersebut diharapkan mampu menjadikan peluang bagi birokrasi untuk menunjukkan eksistensi dalam proses pengembangan inovasi termasuk kreativitas, dengan mengajak masyarakat andil didalamnya.

Inovasi birokrasi dalam pengembangan sektor pariwisata menjadi harapan bagi kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu birokrasi perlu memperbaiki sistem pelayanan publik dan meningkatkan daya saing. Tak terhitung jumlah daerah di Indonesia yang sudah memanfaatkan beberapa dari potensi wisata yang tersedia dan terus melakukan pengembangan dan inovasi hingga saat ini, salah satunya yaitu Kota Semarang yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang sebagai ibu kota dari provinsi Jawa Tengah merupakan kota yang terletak pada sumbu daerah tujuan wisata yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, tidak menutup kemungkinan untuk para wisatawan untuk transit di Kota Semarang (Qadarochman, 2010: 19-20).

Meskipun terletak pada jalur yang strategis, akan tetapi dalam proses pengembangannya Kota Semarang memerlukan inovasi dalam sektor pariwisata agar tidak terkesan stagnan dan datar serta untuk menarik wisatawan mancanegara yang mulai menurun pada tahun 2017 dan 2018. Hal tersebut menjadi semakin *urgent* mengingat persaingan yang begitu ketatnya dalam setiap daerah untuk mendatangkan wisatawan pada daerahnya di era yang milenial seperti saat ini agar lebih menarik untuk dikunjungi dan dapat mensejahterakan masyarakat Kota Semarang.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji dampak inovasi birokrasi di bidang pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis dari penelitian ini yaitu hendak menjelaskan inovasi birokrasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang dalam perspektif teori inovasi dan teori birokrasi. Manfaat praktis diantaranya yaitu bagi birokrasi, masyarakat, dan peneliti lain, agar birokrasi yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ataupun ide pemikiran bagi pemerintah daerah se-

tempat dalam menentukan kebijakan berupa inovasi yang tepat guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengembangan daerah wisata kepada masyarakat, bagi peneliti lain dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan. Selain itu peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada peneliti lain agar dapat lebih baik dalam meneliti inovasi pada birokrasi menggunakan dan mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif lainnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah bentuk inovasi birokrasi pariwisata di Kota Semarang dan dampak inovasi birokrasi dalam pengembangan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber data diperoleh dari informan, dokumentasi, dan peristiwa. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi Kota Semarang harus berpihak kepada masyarakat, sebab tujuan dari segala program kerja yang ada di birokrasi yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari segala macam upaya inovasi yang dilakukan oleh birokrasi tidak lain yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Pariwisata di Kota Semarang mampu mensejahterahkan beberapa kalangan masyarakat mulai dari pedagang, tukang parkir, petugas keamanan, petugas kebersihan, supir transportasi, dan warga masyarakat.

Berikut adalah dampak inovasi dalam pengembangan pariwisata secara rinci bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

### Kesejahteraan Pedagang

Berdagang merupakan mata pencaharian yang umum dan mudah dilakukan oleh masyarakat. Sebagian besar tempat wisata di Kota Semarang memberikan akses bagi masyarakat untuk membuka lapak mereka di sekitar tempat wisata.

Pedagang di beberapa tempat wisata di Kota Semarang mengaku sangat terbantu dengan adanya tempat wisata, sebab dengan adanya wisatawan maka dapat membantu pedagang untuk memberi pemasukan pada perekonomian keluarga. Pedagang di tempat wisata mengaku pendapatan yang mereka dapatkan di tempat wisata lebih banyak daripada pendapatan yang mereka terima sebelum berdagang di tempat wisata dengan selisih yang cukup besar.

Beberapa tempat wisata telah memberikan izin legal kepada pedagang, dan sebagian lagi belum memiliki izi sehingga para pedagang kerap berurusan dengan Satpol PP

atau petugas ketertiban lainnya.

Dalam masalah pendidikan, pedagang di tempat wisata sebagian besar sangat peduli dengan hal tersebut apalagi untuk anak cucunya, mereka menginginkan keluarganya tumbuh cerdas demi masa depan yang cerah.

Sementara itu dalam masalah kesehatan, pedagang juga sebagian besar sangat peduli untuk menjaganya. Baik itu dengan mengikuti program kesehatan dari pemerintah (BPJS, KIS, dll) ataupun dengan biaya pribadi.

### Kesejahteraan Tukang Parkir

Juru parkir memiliki peran penting dalam tempat keramaian seperti pariwisata, karena dapat membantu menertibkan kendaraan yang berhenti, sehingga tidak menyebabkan kemacetan pada sekitar tempat wisata.

Profesi sebagai juru parkir memang cukup menjanjikan apabila berada pada tempat keramaian seperti tempat wisata. Masyarakat Kota Semarang yang menjadi tukang parkir di tempat wisata mengaku terbantu dengan adanya tempat wisata yang ada karena tempat wisata dapat mendatangkan wisatawan terlebih yang membawa kendaraan pribadi.

Pada pariwisata Kota Semarang sebagian besar tempat parkir di tempat wisata telah diresmikan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang, adapun yang tidak dibawah Dishub mereka harus menyeter pada paguyuban kelurahan sekitar.

Dalam masalah kesehatan dan pendidikan, tukang parkir di tempat wisata sangat peduli dengan hal tersebut apalagi untuk anak cucunya, mereka menginginkan keluarganya tumbuh sehat dan cerdas demi masa depan yang cerah.

Sementara itu dalam masalah kesehatan, tukang parkir juga sebagian besar sangat peduli untuk menjaganya. Baik itu dengan mengikuti program kesehatan dari pemerintah (BPJS, KIS, dll) ataupun dengan biaya pribadi

### Kesejahteraan Petugas Keamanan

Tempat wisata akan terasa aman ketika terdapat petugas keamanan. Wisatawanpun tidak resah apabila tempat wisata yang dikunjungi terdapat petugas keamanan yang bertugas.

Menjadi petugas keamanan dengan pendapatan UMR membuat masyarakat yang berprofesi dalam bidang ini tertarik, apalagi jam kerjanya sebagian besar adalah shift, dengan begitu petugas keamanan dapat memiliki usaha sampingan.

Banyak tantangan sulit yang dihadapi oleh petugas keamanan, terutama ketika suasana wisata sedang ramai. Barang ketinggalan, barang hilang, pengkondisian pengamen dan pemulung adalah hal yang biasa mereka hadapi.

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, petugas keamanan di tempat wisata cukup untuk mengatasinya bahkan untuk keluarga. Bagi petugas keamanan, pendidikan sangat penting untuk diberikan dan ditanamkan pada keluarga serta dalam hal kesehatan sebagian besar petugas keamanan menggunakan layanan kesehatan dari pemerintah (BPJS, KIS, dll).

## Kesejahteraan Petugas Kebersihan

Wisatawan akan betah berlama lama di tempat wisata apabila tempat wisata yang mereka kunjungi nyaman dan bersih. Petugas kebersihan memiliki posisi yang penting dalam hal ini.

Suasana wisata yang bersih telah terbukti menjadikan wisatawan betah. Petugas kebersihan yang dapat bekerja di tempat wisata merasa sangat beruntung, karena kebutuhan hidup mereka bergitu terbantu ketika bekerja sebagai petugas kebersihan.

Bagi petugas kebersihan, kesehatan dan pendidikan keluarga adalah hal prioritas terutama untuk anak mereka, agar anak-anak mereka nantinya memiliki masa depan yang cerah, dan tidak merasakan kesusahan yang pernah mereka alami.

## Kesejahteraan Supir Transportasi

Jasa transportasi menjadikan berbagai tempat wisata terjangkau sekalipun akan mudah dikunjungi oleh wisatawan baik dalam kota, luar kota, maupun manca negara.

Pemerintah Kota Semarang memberikan kebijakan baru untuk memajukan pariwisata di Kota Semarang yaitu salah satunya dengan pemberian fasilitas berupa bus wisata bertingkat yang ditujukan kepada seluruh masyarakat secara gratis.

Pemerintah berharap dengan pemberian bus wisata tersebut dapat menjadikan hiburan tersendiri bagi masyarakat tanpa mengeluarkan biaya transportasi dan mencegah kemacetan tujuan lain yaitu untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Semarang.

Pemberian fasilitas bus gratis memberikan akses kepada supir untuk dapat bekerja dengan gaji tetap (atau lembur) untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Bagi supir transportasi kesehatan dan pendidikan keluarga sangatlah penting terutama bagi anak-anak ataupun adik-adik mereka yang masih mengenyam bangku sekolah, sebisa mungkin akan berusaha untuk pendidikan dan kesehatan keluarga mereka demi masa depan yang lebih cerah.

## Kesejahteraan Warga Masyarakat

Pariwisata selain dapat memberikan manfaat pada pihak luar, pada poin terakhir pariwisata juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tempat wisata. Warga masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi wisata mengaku mendapatkan dampak dari hal tersebut. Warga setempat dapat membuka toko kelontong yang menjual minuman dingin dan makanan ringan serta ada pula yang membuka warung makan untuk memfasilitasi wisatawan.

Warga masyarakat mengaku senang dengan kedatangan wisatawan selain dapat menambah pemasukan, kedatangan wisatawan menandakan bahwa mereka tinggal di kawasan yang terkenal dan diminati oleh banyak orang hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga sekitar tempat wisata.

Memasuki era yang serba digital seperti saat ini apabila dimanfaatkan dengan baik dalam sistem layanan maupun bentuk promosi maka dapat menarik wisatawan

manca negara sebab pariwisata di Kota Semarang masih didominasi oleh wisatawan domestik. Birokrasi dalam melakukan inovasi pada bidang pariwisata harus luwes dengan artian mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak terkesan kuno, sesuatu yang modern dan baru adalah hal yang dicari oleh banyak wisatawan terlebih bagi kaum milenial.

Konsep birokrasi Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain.

Teori birokrasi Max Weber yang bersifat legal rasional tidak cocok apabila diterapkan pada birokrasi dengan era digitalisasi seperti saat ini karena terlalu kuno dan tertinggal zaman. Birokrasi Weber bersifat legal, kaku dan birokratik, sedangkan birokrasi harusnya luwes, informatif, murah, dengan layanan yang cepat dan mudah seperti pada DIY dan Kota Bandung.

Kekurangan teori birokrasi Weber jika diterapkan pada birokrasi Kota Semarang yaitu tidak bisa mengimbangi perubahan yang cepat, tidak bisa menangani kendala yang masih banyak, serta tidak mampu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks yang terjadi pada masyarakat.

Pengetahuan dan pembelajaran yang dapat diambil dari sudut pandang ilmu politik yaitu untuk memberikan pandangan tentang idealnya sebuah birokrasi yaitu yang bersifat terbuka, responsif, dan melayani untuk kesejahteraan masyarakat. Birokrasi yang terbuka menjalankan segala kegiatan pemerintah dan pengelolaan negara terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik. Birokrasi yang responsif berarti tanggap menerima segala bentuk umpan ataupun permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun di luar dari masyarakat. Birokrasi pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, dengan demikian maka adanya birokrasi yaitu untuk melayani masyarakat serta harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

## SIMPULAN

Dampak dari adanya inovasi birokrasi di bidang pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Semarang meliputi terpenuhinya kebutuhan perekonomian bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa pekerjaan atau profesi diantaranya yaitu pedagang, tukang parkir, petugas keamanan, petugas kebersihan, supir transportasi, dan warga masyarakat sekitar tempat wisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2018). Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Astini, F. N., Wijaya, A. F., & Muluk, K. (2015). Empirical Study Praktek Inovasi Birokrasi dalam Penanganan Permasalahan Gelandangan di Kota Surabaya. *Administrare*.
- Databoks. (2018, September 10). *Berapa Pendapatan Devisa dari Sektor Pariwisata Indonesia?* Retrieved Februari Kamis, 2018, from Databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/10/berapa-pendapa->

- tan-devisa-dari-sektor-pariwisata-indonesia#
- Ferlanika, Z., Maesaroh. (2015). Strategi Peningkatan Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2010-2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Handoyo, Eko. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Handoyo, Eko., Munandar, Aris., & Susanti, Martien Herna. (2010). *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- Noor, I. (2017). *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Setya, M. V. (2017). Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
- Setyorini, T. (2004). Kebijakan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta CV.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Triyono, A. (2012). Inovasi Kota Semarang Membangun Citra Melalui Strategi "The Amazing City Of Java". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Tapis*.
- Waluya, B. (2001). Dampak Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.